

BAB II

PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK

A. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (*eksekutif*).¹

*Democracy is a set of rules designed to promote self-government. Democracy comes from the greek words demos, which means the people, and kratis, meaning to rule. In simple terms, democracy is a form of government in which the people govern, either directly or through elected representatives*². (Demokrasi adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk mempromosikan pemerintahan sendiri. Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* yang berarti rakyat, dan *kratis* yang berarti memerintah. Dalam istilah sederhana, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diatur oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan terpilih).

Kata pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin

¹ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012), h. 141.

² Thomas E Patterso, *The An Democracy*, New york: Mc Graw hill.2003.h.21

saling berkaitan. Sehingga pemilu yang diselenggarakan tidak jauh dari masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”.³ Sedangkan kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”.⁴

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Ia menyatakan Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi⁵

Dari sudut pandang Hukum Tatanegara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Menurut Sri Soemantri, pemilu yang dilaksanakan harus merupakan pemilihan umum yang bebas, sebagai syarat mutlak bagi

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 683.

⁴ Ibid, h. 989.

⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2009), h. 228

berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalamnya.⁶

Pemilihan Umum menurut ketatanegaraan Indonesia Pemilihan Umum begitu sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi. keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum oleh para perumus atau pembentuk UUD Republik Indonesia 1945 dapat diketahui dari ayat (1) Aturan Tambahan UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan: “dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan Undang-undang Dasar ini” akan tetapi, pemilihan umum baru terlaksana pada tahun 1955 melalui UUDS 1950. Selama pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945. Selanjutnya melalui amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan umum secara tegas ditentukan dalam UUD 1945 yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali UUD 1945 setelah amandemen menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang agar dilaksanakan secara demokratis. Dikatakan UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai praktik

⁶Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 16

ketatanegaraan, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Disamping itu Perlunya adanya penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen.⁷

Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilihan umum meliputi:

1. Legitimasi (Pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi
2. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai
3. Rekruitas elit partai politik
4. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih
5. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu
6. Pengontrolan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan
7. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai
8. Mengundang suatu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan

⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 46-47.

9. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu pemerintah
10. Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.

B. Politik

Kata “Politik” secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani, *Politeia*, yang akar katanya adalah *Polis*, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia*, yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik, dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Dimana politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sementara itu *policy*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, atau tujuannya yang dikehendaki. Pengambilan kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.⁸

⁸ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta:Erlangga, 2010), h .110.

Politik dalam Bahasa Arab سياسة (siyasah) diambil dari kata ساس (saasa) yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, melatih dan memajemen.⁹

Menurut Carl J. Friedrich partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materi (*Apolitical, party is a group of human beings, stably organized with the objektif of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party through such control ideal and meterial benefits and advantages*).¹⁰

Berbicara politik tidak lepas dari yang namanya kampanye politik dimana menurut Nursal dalam politikal marketing, terdapat tiga strategi kampanye politik yaitu: pemasaran produk politik secara langsung kepada calon pemilih (*Push political marketing*), pemasaran produk politik melalui media massa (*pull political marketung*), dan melalui kelompok tokoh atau organisasi yang berpengaruh (*pass political marketing*).

1. *Push political*, merupakan strategi yang berfokus pada isu-isu yang penting bagi dan bukan hanya menjual kandidat atau partai namun juga bisa

⁹ Farid Nu'man Hasan, *Seuntai Bunga Rampai Politik Islam*, (Depok;Tauhid Media Center, 2009), h 1-2.

¹⁰Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2015 cet. 3), h. 404.

melalui relawan yang datang membagikan brosur, *flyer*, *sticker*, dan sebagainya.

2. *Pull political*, merupakan paling banyak dilakukan oleh partai atau kandidat, dimana strategi ini menyampaikan pesan melalui media massa baik elektronik, cetk, luar ruang, mobile, maupun internet, yang dapat menyampaikan pesan banyak kepada khalayak banyak namun kurang dapat terukur efektivitasnya karena membutuhkan banyak biaya sehingga hanya memungkinkan dilakukan oleh partai maupun kandidat yang punya banyak dana.
3. *Pass political*, merupakan strategi yang disampaikan melalui individu, kelompok maupun organisasi yang mempunyai pengaruh yaitu dengan cara-cara pendekatan dan lobbying pada strategi ini dimana perlu di sesuaikan dengan tipe-tipe individu, kelompok dan organisasinya.¹¹

Ada beberapa lembaga sosialisasi terpenting yang mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap politik yaitu.

1. *The Family* (Keluarga)
2. *Sosial Groups* (Kelompok Sosial)
3. *Differences in Education* (Perbedaan dalam Pendidikan)
4. *Political Ideology* (Ideologi Politik)
5. *Knowled and Information* (Pengetahuan dan Informasi)

¹¹ Debora Sanur Lindawati, *Strategi Partai Politik dalam menghadapi pemilu 2014*, Vol 4, Nomor. 2 November 2013. h.294.

6. *Government and Political Leaders* (Pemimpin Pemerintahan dan Politik).¹²

C. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, dimana mereka yang memusatkan perhatiannya dan pengendalian kekuasaan pemerintahan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda dimana partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat.¹³

Berikut ini pengertian partai politik menurut beberapa ahli.

a. Miriam Budiardjo

Mengatakan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang diorganisis anggota-anggotanya dan memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.

¹²Theodore J. Lowi dkk. , *American Government Power and Purpose*, New York: Printed in the United States of America. h. 370-384.

¹³Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: PT Gramedia,1981), h.14.

b. Carl J. Friedrich

A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages (Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah an bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan. Selain partai politik, infrastruktur politik terdiri dari organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, kelompok penekan, kelompok tokoh masyarakat, dan media (pers))

Selain pendapat para ahli tersebut, Pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Tujuan, Tugas dan Fungsi Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Yaitu:

1. Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan Khusus Partai Politik adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
 - b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Fungsi Partai Politik

Berikut beberapa fungsi dari partai politik yaitu:

- a. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sebagai sarana penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁴

Fungsi pokok Partai Politik menurut G.B. de Huszar dan T.A. Stevenson ada tujuh yaitu:

1. Pengajuan calon-calon wakil rakyat (*Proposing candidates*)
2. Merangsang pendapat umum (*Stimulating public opinion*)
3. Mendorong rakyat untuk memilih (*Getting people to vote*)
4. Sikap kritis terhadap pemerintahan (*Criticism of the regime*)
5. Tanggung jawab pemerintahan (*Responsibility for government*)

¹⁴ Arie Sulistyoko, *Ilmu Politik*, (Serang Baru: Laksata Indonesia, 2019), h. 64-66.

6. Memilih para pejabat negara (*Choosing appointive officer*)
7. Kesatuan dalam pemerintahan (*Unifying the government*)¹⁵

Fungsi Partai Politik menurut Maurice Duverger ada Enam yaitu :

1. Komunikasi politik dan penyaluran aspirasi rakyat
2. Pendidikan dan pemyarakatn politik kepada rakyat
3. Membina calon-calon pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum.
4. Penanggulangan konflik politik melalui cara-cara damai.
5. Melaksanakan pemerintahan (memenangkan pemilu)
6. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.¹⁶

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya partai politik berperan dalam upaya meningkatkan motivasi warga masyarakat dalam pemilu.

Dari tujuan, tugas dan fungsi Partai Politik kita dapat memahami penyebab yang mempengaruhi pelaksanaannya dari tiga faktor antara lain:

1. Sosok Partai Politik

¹⁵T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaanya*, Bandung: Refika Aditama, cetakan keempat 2009.H. 91.

¹⁶ Ibid., h. 91-91.

Sosok partai politik ini merupakan kekuatan politik utama supaya dapat memobilisasi massa.

2. Sistem Partai Politik

Sistem partai politik merupakan suatu set partai politik yang beroperasi di dalam suatu bangsa dalam sebuah pola pengorganisasian dan terwujudnya oleh sejumlah sistem bangsa dalam sebuah pola pengorganisasian dan terwujudnya oleh sejumlah sistem properti partai seperti koalisi, kelangsungan pemerintah, disproportionalitas pemilih, sejumlah dimensi isu, dan sejumlah partai efektif.

3. Basis Sosial Partai

Basis sosial merupakan tatanan nilai dan kepentingan masyarakat berupa kelompok dan organisasi yang memformasikan masyarakat sehingga berguna bagi partai untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya politik.¹⁷

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi-Fungsi Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal Partai

- a. Sikap Pemimpin partai politik
- b. Kedisiplinan pengurus partai politik

¹⁷ Mushab Robbani, Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik (Studi Partai Keadilan Sejahtera DPD Bandar Lampung), Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2016. h. 34-35.

- c. Kemandirian partai politik
 - d. Loyalitas pengurus partai
 - e. Strategi atau taktik partai
2. Faktor Eksternal
- a. Basis Partai
 - b. Sistem Partai Politik.¹⁸

E. Motivasi Politik

Motivasi diambil dari kata *motive* yang berarti dorongan atau dalam bahasa Inggris disebut *to move*. Motiv diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*driving force*). Motiv tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal.¹⁹

Motivation is the activation or energization of goal-orientated behavior. According to various theories motivation may be rooted in the basic need to minimize physical pain and maximize pleasure or it may include specific needs such as eating and resting or a desired object, hobby goal state of being ideal or it may be attributed to less apparent reasons such as altruism selfishness morality or avoiding mortality. Conceptually optimism Motivation should not be confused

¹⁸ Mushab Robbani, Op.,cit., h. 11

¹⁹ Widayat Prihartanta, *Teori-Teori Motivasi*, Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Jurnal Adabiya, Vol. 1 No. 83 Tahun 2015. h. 2.

*with either volition or related to but distinct from, emotion.*²⁰ (Motivasi adalah pengaktifan atau pemberian energi dari perilaku yang berorientasi pada tujuan. Berdasarkan berbagai teori, motivasi dapat dirangkum dalam kebutuhan dasar untuk meminimalkan rasa sakit fisik dan memaksimalkan kesenangan atau mungkin mencakup kebutuhan khusus seperti makan dan beristirahat di benda yang dikenali, objek tujuan hobi. menjadi ideal atau dapat dikaitkan dengan alasan yang kurang jelas seperti altruisme egoisme atau menghindari kematian. Optimisme konseptual motivasi, motivasi tidak boleh dikacaukan dengan kemauan atau hubungan baik tetapi berbeda dari, kepercayaan)

Michel J. Jucius menyebutkan motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.²¹

²⁰ Marina Jelencic, *Motivation theories-an overview*, Germany:Grin Verlag, 2010.h. 2

²¹ Widayat Prihartanta, op.cit., h. 3.

Menurut Chatab, ada 5 (Lima) faktor motivasi yaitu terdiri sebagai berikut:

- a. Hasil kerja, keberhasilan atau prestasi
- b. Pengakuan atau penghargaan
- c. Pekerjaan yang penuh tantangan
- d. Tanggung jawab yang lebih besar
- e. Kemajuan dan pertumbuhan

Selain pendapat di atas Vroom juga mengemukakan bahwa ada tiga yang mendasar dalam motivasi yaitu:

1. Harapan (*expectancy*).
2. Nilai (*valence*).
3. Pertautan (*inatrumentality*).

Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Yang artinya apabila seseorang menginginkan sesuatu dan jalan telah terbuka untuknya maka yang bersangkutan akan berusaha untuk mendapatkannya.²²

Motivasi Pemilih merupakan Perilaku memilih seseorang baik untuk memilih partai politik maupun calon pemimpin yang merupakan manifestasi dari banyak faktor dan mengenai alasan warga untuk memilih. yakni menyangkut motivasi intelektual warga untuk memilih dalam

²²<https://www.materibelajar.id/2016/04/teori-konsep-motivasi-pengertian-jenis.html>, diakses pada hari sabtu, 06-07-2019 Pukul 09:56 WITA.

pemilu Studi ini memandang perilaku memilih sebagai pilihan memilih (*voting choice*). Khususnya ditujukan pada pilihan dalam pemilu sampai pada upaya untuk mengetahui indikasi motivasi yang mendorong individu untuk menentukan pilihannya.

Faktor-Faktor atau motivasi yang mendorong seseorang untuk memilih kandidat atau partai politik terdiri dari banyak aspek. Menurut Evans beberapa aspek yang bisa mendorong seseorang untuk menentukan pilihannya adalah:

- 1). *group benefit* (Manfaat Kelompok)
- 2). *material gain* (keuntungan material)
- 3). *managerial competence* (Kompetensi Manajerial)
- 4). *focus on relevant issues* (fokus pada masalah yang relevan)
- 5). *another party's defeat* (kekalahan pihak lain)²³

Motivasi politik merupakan suatu mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang atau kelompok terhadap suatu nilai, pengetahuan, kepercayaan, sikap politik dan harapan politik tertentu. Motivasi politik tidak hanya ditujukan untuk perubahan sikap tetapi juga terbentuknya suatu perilaku yang diharapkan.²⁴

²³ Wawan Edi Kuswandro, *Motivasi Sosial, Rasional dan Ideologis Pemilih Pada Pemilukada*, Artikel, 2013. h. 4.

²⁴ Susi Fitria Dewi, *Sosiologi Politik*, Magelang: Gre Publishing, 2017. h. 66.

